



**TINJAUAN YURIDIS KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
IBU KOTA NEGARA NUSANTARA BERDASARKAN SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SKRIPSI

FADRIYATUN

1910611058

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

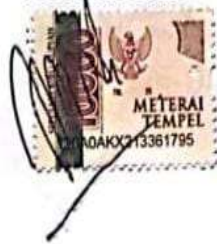
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023

PERNYATAAN ORIINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fadriyatun
NIM : 1910611058
Tanggal : 13 Januari 2023
Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fadriyatun

NIM/NPM : 1910611058

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul :Kesinambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 16 Januari 2023

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL
204 213361785
Fadriyatun



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN IBU KOTA
NEGARA NUSANTARA BERDASARKAN SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

FADRIYATUN

1910611058

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Ali Imran Nasution, SH., MH.
NIP. 199003112019031014

ii



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Fadriyatun
NPM : 1910611058
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisa Yuridis Kesenambungan Pembangunan Ibu Kota
Negara Nusantara Berdasarkan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH, MH.
(Ketua)

Dian Khorcanita P, SH, MH
(Anggota 1)

Ali Imran Nasution, SH., MH
(Anggota 2)



Dr. Abdul Halim M. Ag
M.H.
(Dekan Fakultas Hukum)

Taupiqqurrahman, S.H.,
(Kaprodi Fakultas Hukum)

iii

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia has stipulated the transfer of the National Capital in North Paser Regency, East Kalimantan. The transfer process officially began when Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital was passed. The enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital has reaped Pros and Cons in the community and even repeatedly submitted to the Constitutional Court. Meanwhile, the government is trying to respond by revising Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. This shows its unpreparedness as a legal instrument that can provide legal certainty for the continuity and continuity of the development of the National Capital of the Archipelago. The problems raised in this study are how to guarantee legal certainty of the continuity of development of the National Capital of the Archipelago and how to strengthen the continuity of development of the National Capital of the Archipelago. This research uses normative juridical research methods using a conceptual approach. From the research that has been carried out, it can be concluded that the Capital City of the Archipelago has the potential to have no continuity in its implementation so that the development of the National Capital City must be in accordance with the National Development Planning System (SPPN) Law and accommodated in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) Law 2025-2045 so that the development of the National Capital of the Archipelago can be carried out thoroughly, integratedly, directed, and sustainable in realizing the vision and mission of the Republic of Indonesia.

Keywords: Sustainability, National Development, National Capital.

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan tersebut secara resmi dimulai saat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menuai Pro-Kontra di tengah masyarakat bahkan berulang kali diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pemerintah berupaya meresponnya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini menunjukkan ketidaksiapannya sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana jaminan kepastian hukum kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan bagaimana upaya memperkuat kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara berpotensi tidak memiliki kesinambungan dalam pelaksanaannya sehingga pembangunan Ibu Kota Negara harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan diakomodir di dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat dijalankan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam mewujudkan visi dan misi NKRI.

Kata Kunci: Kesinambungan, Pembangunan Nasional, Ibu Kota Negara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan bimbingannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kestinambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”**. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian, secara khusus pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis dan segenap keluarga tercinta atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang terus menyertai;
2. Ibu Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Ali Imran Nasution, SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dari segi akademik, moral, dan lain-lain;
7. Para Sahabat Penulis, dalam lingkup Fakultas Hukum yakni Raihan Wibowo, Roki Arnanda Saputra, Ni Wayan Widya Pratiwi, Fachri Fadillah, Gilang Abi Zaifa dan sahabat penulis lainnya yang telah

memberikan bantuan dan doa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis bersyukur dan bangga memiliki sahabat seperti kalian;

8. Para Sahabat Penulis, Patriya Yuliana Putri, Efranda Praviatin, Kagummy Audrey, Melisa Safrida yang telah memberikan bantuan dan doa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis bersyukur dan bangga memiliki sahabat seperti kalian;
9. Para Kakak Tingkat Penulis, Syafira Nurullia, Fadly Ikhsan, Alfa Fitri, M. Raidendy Prihasto, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk apapun selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian;
10. Teman-Teman Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
11. Para pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada Penulis hingga mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini dirahmati oleh Allah SWT. Pada dasarnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan banyak manfaat kepada insan pendidikan dan khalayak umum.

Bekasi, 13 Januari 2023



Fadriyatun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Hukum Pembangunan.....	13
2. Sistem Pemerintahan.....	19
3. Peraturan Perundang-Undangan.....	22
BAB III.....	25
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	25
A. Ibu Kota Negara Nusantara Sebagai Kota Dunia.....	25
B. Negara-Negara Yang Berhasil Memindahkan Ibu Kota Negara.....	27

C. Negara-Negara Yang Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara.....	28
BAB IV.....	31
PEMBAHASAN.....	31
A. Kepastian Hukum Kesenambungan Pembangunan Ibu Kota Negara.....	31
B. Memperkuat Kepastian Hukum Kesenambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.....	48
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61